

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Input

a) Kebijakan

Pelaksanaan kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan yang mencakup pencapaian tiga indikator tertuang dalam surat Edaran Bersama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Puskesmas. Adanya kebijakan ini bisa menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi implementasinya. Untuk pelaksanaan KBKP ini juga diperlukan komitmen antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan dengan berkomitmen untuk memenuhi ketiga indikator KBKP.

b) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan jumlah sumber daya manusia di Puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan mencukupi. Namun masih ada kekurangan SDM Dokter, karena dari 25 Puskesmas hanya memiliki 25 orang dokter dan masih ada kekurangan dokter 21 orang lagi. Tapi kalau dilihat dari pencapaian indikator ratio rujukan non spesialisistik yang merupakan kompetensi Dokter Umum untuk menuntaskan diagnosa semua Puskesmas berada di zona aman artinya walaupun dari segi kuantitas kekurangan namun dari segi kualitas mendukung, sedangkan untuk dapat memenuhi indikator angka kontak komunikasi dan ratio peserta prolanis rutin berkunjung, SDM di Puskesmas sudah mencukupi, namun diperlukan kedisiplinan petugas untuk menjalankan komitmen.

c) Dana

Sumber pendanaan di Puskesmas berasal dari dana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dana kapitasi peserta JKN-KIS yang terdaftar. Untuk mencapai indikator angka kontak komunikasi dan ratio peserta prolanis rutin berkunjung pada Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman di peroleh gambaran bahwa ketersediaan dana telah mencukupi namun diperlukan pengelolaan secara baik dan perencanaan dalam penggunaan dana.

d) Metode

Ketersediaan metode pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan berupa petunjuk teknis pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Kementerian Kesehatan dan Bersama BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen di FKTP. Penilaian indikator Angka kontak komunikasi dilakukan setiap bulan dengan mengikuti mekanisme pelaksanaan KBKP, serta dilakukan validasi terhadap data yang ada baik tertulis maupun hasil luaran aplikasi.

e) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana kurang mencukupi untuk mencapai indikator angka kontak komunikasi seperti laptop/komputer jaringan internet/modem, dan kadang-kadang terkendala karena masalah jaringan, serta untuk ketersediaan sarana alat kesehatan masih ada kekurangan pada Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan belum ada mekanisme yang jelas dalam pengadaan barang atau alat kesehatan.

2. Proses

a) Perencanaan

Puskesmas melakukan perencanaan terhadap pencapaian indikator angka kontak komunikasi dan ratio peserta prolanis rutin berkunjung dengan melibatkan semua sumber daya manusia di Puskesmas. Diperlukan perencanaan yang strategik dengan memberi masing-

masing petugas Puskesmas untuk melakukan kontak komunikasi, data bisa diambil dari kegiatan Posyandu, kunjungan rumah, penyuluhan dan lain-lain dan perencanaan yang dapat mengintegrasikan pencapaian indikator dengan beberapa tanggung jawab program yang dilakukan oleh Puskesmas serta pengawasan oleh Kepala Puskesmas.

b) Pencapaian

Pencapaian indikator angka kontak komunikasi berada pada zona aman dan tidak aman, dan Rasio Peserta Prolanis yang berkunjung pada Puskesmas berada di zona aman dan tidak aman.

3. Output

- a) Angka Kontak Komunikasi dipengaruhi oleh kedisiplinan, komitmen dan kualitas yang baik dari sumber daya manusia, dana operasional dan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang bisa diintegrasikan dengan wewenang Puskesmas.
- b) Rasio Peserta Prolanis yang berkunjung ke Puskesmas dipengaruhi oleh kontinuitas pemantauan yang dilakukan terhadap peserta klub prolanis baik berupa jenis aktivitas, dokumentasi kegiatan dan pemahaman atau pelaksanaan 7 pilar prolanis bagi peserta klub serta update data peserta klub prolanis di Aplikasi P-Care.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

- a. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas dan Dinas Kesehatan tentang kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan pelaksanaannya di Puskesmas, serta diharapkan pihak BPJS melakukan seleksi dan rekredientialing terhadap kebijakan yang akan diterapkan dengan menggunakan kriteria teknis yang meliputi salah satunya komitmen pelayanan
- b. Melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan beban kerja masing-masing Puskesmas, misalnya untuk ketersediaan dokter umum berdasarkan perhitungan BPJS Kesehatan (WHO,1;5.000) dibutuhkan penambahan 21 orang

dokter umum, serta disarankan agar selalu melakukan pengawasan secara kontiniu agar kualitas sumber daya manusia bisa lebih ditingkatkan.

- c. Melakukan optimalisasi penggunaan dana kapitasi JKN untuk kegiatan promotif dan preventif diluar kegiatan klub prolanis.
- d. Diperlukan metode atau perencanaan yang jelas dalam melaksanakan suatu kebijakan.
- e. perlu adanya perencanaan dan pengelolaan yang jelas oleh Dinas Kesehatan terutama dalam pengadaan barang atau alat kesehatan pada Puskesmas. Pengelolaan yang jelas dapat dilakukan dengan membagi tim regional Puskesmas pada masing-masing SDM di Dinkes yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, sehingga dana alat kesehatan dan obat-obatan yang ada di Puskesmas dapat dikelola dengan baik.

2. Bagi Puskesmas

- a. Perlu adanya perencanaan strategik untuk pengintegrasian kegiatan pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan dengan objek peserta JKN-KIS dengan kegiatan program Puskesmas lainnya.
- b. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengadakan workshop atau pelatihan tentang juknis KBK, program prolanis. Pelatihan diberikan kepada Dokter, Perawat, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya.
- c. Perlu direncanakan untuk rekrut SDM untuk pengelolaan keuangan
- d. Perlu adanya sistem pencatatan atau dokumentasi kegiatan yang terstruktur dan lengkap serta mudah di evaluasi oleh Pimpinan Puskesmas, misalnya bisa memantau progres pengentrian pelayanan di Puskesmas satu kali seminggu.
- e. Perlu adanya perencanaan yang untuk alat kesehata dan obat-obatan yang sesuai dengan Permenkes No 75 Tahun 2014.

3. Bagi BPJS Kesehatan

- a. Perlu adanya aplikasi pemantauan hasil pencapaian indikator sebelum perhitungan akhir setiap bulannya

- b. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada petugas Puskesmas akan prosedur penilaian angka kontak komunikasi dan ratio prolanis rutin berkunjung melalui berbagai media.

